



UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA

Soni Gustika¹⁾; Karona Cahya Susena²⁾

¹⁾ Study Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ Sonigustika123@gmail.com; ²⁾ Karona.cs@unived.ac.id

Abstract

Development in the era of globalization relies heavily on the economic sector as a measure of success carried out by the government. The role of the community in national development, especially in economic development, is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The position of MSMEs in the national economy has an important and strategic role. This condition is very possible because the existence of MSMEs is quite dominant in the Indonesian economy. MSMEs after the economic crisis continued to increase from year to year. This also proves that MSMEs are able to survive in the midst of an economic crisis. MSMEs are also proven to absorb a larger workforce in the national economy. With the large number of workers absorbed, the MSME sector is able to increase people's income. Thus MSMEs are considered to have a strategic role in reducing unemployment and poverty. For the contribution and role of MSMEs, it is important for the government to continue to support MSMEs through strengthening so that their role as a pillar in building the nation's economy can run optimally.

Keywords: MSMEs, Development of National Economy

Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Pembangunan mengarah kepada perubahan ke arah lebih baik dari taraf hidup sebelumnya. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sector ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata ditambah lagi dengan tidak diimbangnya kehidupan sosial, politik, ekonomi maka pembangunan akan rapuh. Oleh karenanya, pembangunan harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan. Salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan hal urgen dalam suatu negara, utamanya dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertambahan dari pendapatan perkapita yang digambarkan sebagai gambaran suatu perekonomian negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan seluruh dukungan sumber daya yang ada dan merancang serta membangun ekonomi daerah. Pujiono (2013) Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan nasional meliputi aspek kehidupan bangsa dan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban mengarahkan dan melindungi serta membangun iklim yang kondusif, aman, dan tentram guna menunjang pembangunan nasional. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industry yang besar dan terdapat dalam setiap sector ekonomi; potensi yang besar dalam

penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan.

Alasan lainnya adalah usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industry pengolahan, listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Maka hal ini membuktikan bahwa UMKM dan usaha besar saling melengkapi dan saling membutuhkan, meskipun pada kenyataannya UMKM lebih dominan dalam penyerapan tenaga kerja hingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Tinjauan teoritis

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya dari aspek ketahanan, aspek pembiayaan, perolehan pinjaman atau dari aspek manajerial usaha. Pada era globalisasi khususnya dengan adanya integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi (Economic Union) yang menjadikan Asia Tenggara menjadi suatu komunitas perekonomian dengan basis produksi tunggal membuat UMKM harus mampu mempertahankan eksistensinya ditengah gempuran ekonomi global. Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk mampu bersaing dan menciptakan produk yang dapat diterima, tidak hanya oleh konsumen dalam negeri (Indonesia) tetapi juga konsumen di Asia Tenggara. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selalu hadir karena memang diperlukan. UMKM ini selalu pula dapat membuktikan ketahanannya, terutama Ketika bangsa kita dilanda badai krisis ekonomi (sejak Juli 1997). UMKM ini tampak merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Data BPS dan Kementerian Koperasi dalam Wahyudin (2013:27), dari seluruh kelas usaha menunjukkan bahwa usaha skala kecil di Indonesia menempati porsi sekitar 99%, artinya hampir seluruh usaha di Indonesia merupakan usaha kecil, hanya 1% saja usaha menengah dan besar. Perkembangan dan Pertumbuhan UMKM pun cukup bagus dari tahun ke tahun. Hampir dari setiap pemerintahan menekankan pada pemberdayaan UMKM. Pemerintah secara serius memberikan perhatian lebih pada sektor usaha ini. Alasannya, usaha kecil ini menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja, karena perusahaan besar lebih menekankan penggunaan teknologi dari pada tenaga kerja manusia. UMKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, disebabkan UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar. UMKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar kekonsumen. Kedudukan UMKM ini semakin mantap. Selain mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, UMKM ini bersifat lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global seperti saat ini. Umumnya, UMKM memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari usaha besar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Di Negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai menurut karakteristik masing – masing Negara, yaitu sebagai berikut

1. World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
2. Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
3. Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
4. Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufaktur dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta.
5. Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.
6. Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5-10 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal \pm US\$ 6 juta.

Dalam karakteristik disini ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Metode penelitian

Metode penelitian menggunakan metode studi dokumen atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang ditelusuri melalui jurnal pada beberapa media elektronik seperti digital library, website maupun koneksi jurnal perpustakaan. Penelusuran jurnal dilakukan melalui Google Browser dan Google Cendekia. Penelusuran jurnal dilakukan dengan menggunakan kata kunci : UMKM, Pengembangan Ekonomi Nasional, Pilar Ekonomi Bangsa. Dari masing-masing hasil penelitian yang diperoleh, dianalisis lebih lanjut, yang kemudian digunakan sebagai jurnal pendukung untuk memperkuat bahwa UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa.

Hasil dan pembahasan

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang dampaknya masih terasa sampai sekarang telah menorehkan sejarah perekonomian dan pembelajaran yang luar biasa. Jika mau belajar dari krisis ekonomi tersebut ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik, antara lain:

1. Membangun ekonomi tidak bertumpu pada kekuatan sendiri, melainkan pada utang luar negeri,
2. pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada perusahaan besar ternyata tidak cukup kuat untuk menghasilkan struktur sosial – ekonomi,
3. UMKM yang kurang mendapatkan perhatian ternyata justru mampu bertahan ditengah badai krisis ekonomi dan mampu menggerakkan roda perekonomian dengan kekuatan sendiri.

Belajar dari krisis ekonomi tersebut, UMKM diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting karena peran dan fungsinya dalam perekonomian. Dan pemerintah mulai memberikan perhatian pada UMKM. Meskipun demikian, UMKM tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam penguatan UMKM guna perkembangan UMKM itu sendiri. Perkembangan dan pertumbuhan UMKM perlu terus ditingkatkan karena perannya dalam menyediakan lapangan kerja yang secara langsung akan mengurangi pengangguran yang berujung pada mengatasi kemiskinan. Dengan penguatan UMKM melalui komitmen pemerintah diharapkan akan meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan gairah usaha, dengan demikian UMKM dapat menjadi pilar membangun perekonomian bangsa. Perannya yang begitu besar dalam perekonomian nasional, sudah seharusnya UMKM mendapat perhatian khusus dari pihak pengambil kebijakan. Dibawah kementerian Koperasi dan UMKM diharapkan UMKM bersama koperasi dalam kiprahnya mampu menjadi penopang perekonomian bangsa. Dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah perlu sentuhan kreatifitas untuk memberi value (nilai) pada hasil produk barang dan jasa. Membangun ekonomi merupakan proses untuk memperbaiki kualitas masyarakat disektor ekonomi

Sedang menurut Sanusi (2011) menyebutkan bahwa membangun ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Terdapat hal penting dalam makna yaitu: (1) suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus, (2) suatu usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita, (3) kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Membangun ekonomi menurut Sukirno (2004) merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan dalam aspek lain dalam perekonomian, seperti perkembangan pendidikan, perkembangan kualifikasi SDM, perbaikan teknologi dan meningkatnya taraf kemakmuran masyarakat. Dimana tingkat kemakmuran ini umumnya diukur dari tingkat pendapatan per kapita nominal yang dihitung dengan pendekatan formula PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Membangun ekonomi harus secara terus menerus diikuti oleh pengembangan institusi yang dapat memberi dorongan kepada pengembangan berbagai kegiatan ekonomi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa yang diikuti pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dengan demikian arah membangun ekonomi haruslah merupakan penjabaran dari demokrasi ekonomi yang dimaknakan untuk membebaskan rakyat dari keterbelakangan dan kemiskinan seperti yang Usaha kecil adalah setiap usaha perorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan dibidang ekonomi yang dilakukan secara sederhana untuk memperoleh keuntungan. Usaha kecil merupakan usaha dalam skala kecil. Usaha kecil menurut edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK perihal kredit usaha kecil (KUK adalah usaha

yang memiliki total asset maksimal Rp. 600.000.000,- sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1995 yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha mikro kecil menengah adalah usaha yang dijalankan rakyat kecil dan bersifat keluarga menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri (Bank Indonesia).

Menurut perkembangannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

1. Livelyhood Activity Kelompok usaha ini lebih dikenal sebagai kelompok usaha sektor informal, usahanya dianggap dan digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari demi pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise Kelompok usaha ini melakukan kegiatan yang sifatnya cenderung sebagai pengrajin. Ia memiliki kemampuan menghasilkan suatu produk namun belum memiliki sifat kewirausahaan untuk memajukan produknya.
3. Small Dynamic Enterprise Kelompok usaha yang menjalankan bisnisnya telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise Kelompok ini selain telah memiliki jiwa kewirausahaan, juga memiliki tujuan memajukan usahanya dengan melakukan transformasi menjadi usaha besar (Surya, 2015).

Usaha Kecil Mikro dan Menengah merupakan bagian penting dari perekonomian suatu bangsa. Karena peran pentingnya tersebut pemerintah terus melakukan upaya mengembangkan UMKM. Maka dari itu perlu dukungan dari berbagai kalangan untuk penguatan UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) seperti yang diungkapkan oleh Suyatno (2000) bahwa untuk dapat meningkatkan daya saing UMKM diperlukan meningkatkan kemampuan teknologi dan daya kreatif inovatifnya. Peningkatan kemampuan teknologi mempunyai hubungan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi. Secara umum UMKM dalam perekonomian bangsa memiliki peran:

1. Sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi;
2. Penyedia lapangan kerja terbesar;
3. Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
5. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Efendi Ishak, (2005) sebagai pilar perekonomian bangsa. Permasalahan umum yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM adalah kurangnya SDM yang kompeten dibidangnya,

Lemahnya kreativitas dan inovasi, lemahnya kemampuan dalam membaca peluang yang ada, permodalan usaha, serta lemahnya strategi pemasaran (marketing). Sistem jaringan yang masih kurang juga menjadi permasalahan pokok, karena sebaik apapun kualitas produk yang dihasilkan apabila kurang promosi dalam hal pemasaran juga tidak mampu bersaing. Maka dari itu penting bagi pelaku UMKM mempunyai jaringan usaha yang kuat guna memasarkan produk yang dihasilkan. Pada praktiknya UMKM ternyata bukan sektor usaha yang bebas masalah. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang perlu perhatian dan penanganan serius. Antara lain masalah permodalan yang disebabkan sulitnya memiliki akses dari Lembaga keuangan karena keterbatasan jaminan (collateral), kurangnya akses informasi pasar yang merupakan kendala dalam hal pemasaran. Sehingga berakibat rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing ditingkat global. Untuk menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Maka dari itu, penting bagi UMKM untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi

maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Menurut Effendi Ishak, (2005) informasi pasar produksi atau pasar komoditas yang diperlukan, misalnya (1) jenis barang yang dibutuhkan, (2) daya beli masyarakat, (3) harga pasar yang berlaku, (4) Dengan demikian, UKM dapat mengantisipasi berbagai kondisi pasar sehingga dalam menjalankan usahanya akan lebih inovatif. Sedangkan informasi pasar faktor produksi meliputi: (1) sumber bahan baku yang diperlukan, (2) harga bahan baku, (3) bagaimana memperoleh modal usaha, (4) siapa tenaga kerja yang profesional, (5) tingkat upah atau gaji yang layak, selera konsumen pada pasar lokal, regional maupun internasional. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM dalam memperoleh akses memperluas jaringan pemasarannya. Selain memiliki kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar, UMKM juga perlu memiliki kemudahan dan kecepatan dalam mengkomunikasikan atau mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Naisbit, 1994 (dalam Singgih), perkembangan ekonomi dunia akan didominasi oleh usaha kecil dan menengah, dengan kata lain negara yang memiliki jaringan yang kuat pada usaha kecilnya akan berhasil dalam persaingan dipasar global. Penguatan UMKM tentunya tidak bisa lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak, diantaranya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang diharapkan mampu memberikan dukungan kepada UMKM dari sisi permodalan.

Pemberdayaan LKM lebih difokuskan pada aspek penguatan kelembagaan dengan tujuan agar kebijakan LKM lebih memihak pada UMKM terutama untuk aksesibilitas permodalan. Oleh karena itu pemberdayaannya LKM harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, serta menumbuhkan wirausahawan baru yang tangguh. Perkembangan dan pertumbuhan UMKM perlu dukungan dari berbagai pihak mengingat perannya yang sangat besar dalam kontribusinya pada bangsa dan negara. Bentuk dukungan yang diberikan merupakan penguatan UMKM agar tetap eksis dalam membangun ekonomi bangsa, salah satunya adalah penguatan permodalan.

Melihat antusiasnya perkembangan UMKM dari tahun ke tahun sejak 2012, pemerintah menetapkan UU kredit bagi UMKM, karena pemerintah menyadari bahwa perkembangan UMKM tidak dapat terlepas dari dukungan perbankan dalam hal penguatan permodalan dalam bentuk penyaluran kredit UMKM. Untuk mendukung penguatan UMKM ini Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5% dari semua sector UMKM, tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 15% dan pada akhir tahun 2018 juga sudah ditetapkan sebesar 20%. Ketentuan Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia sangat merespon perkembangan UMKM. Diharapkan dengan adanya penguatan permodalan tersebut pertumbuhan dan perkembangan UMKM benar-benar dapat mewujudkan harapan bahwa penguatan UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. Selain perbankan banyak perusahaan BUMN dan swasta yang ikut serta membantu meningkatkan UMKM, antara lain PT. Telkom Indonesia dan PT. Pegadaian yang memberikan bantuan penguatan UMKM melalui permodalan dan akses pasar.

Penguatan UMKM serupa juga dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani bersama PT. Asuransi Jiwasraya dan Jamkrindo berkomitmen untuk mendukung aktivitas para pelaku UMKM. Sinergisitas ini bermanfaat untuk mengembangkan serta memberdayakan sektor UMKM, menyadari pentingnya kontribusi UMKM dalam membangun ekonomi bangsa. Publikasi Statistik kredit UMKM berdasarkan definisi dan kriteria usaha berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mulai dilaksanakan untuk data laporan bulanan bank sejak Januari 2011. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi dan pertumbuhan ekonomis sangat kondusif. UMKM mempunyai peran dan strategi dalam membangun ekonomi bangsa. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia termasuk besar dibanding negara lainnya sejak tahun 2014. Jumlah UMKM terus mengalami perkembangan dari tahun 2015 hingga 2017, yang salah satu pemicunya adalah tingginya usia produktif dibanding jumlah lapangan kerja yang tersedia. Kondisi yang demikian memicu para usia produktif membuka peluang untuk menciptakan usaha sendiri, yang sebagian besar tergolong pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan perkembangan UMKM yang berkembang baik Presiden RI (2016) menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu menopang perekonomian bangsa. Juga dikatakan bahwa pemerintah sadar betul betapa pentingnya pengembangan Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah. Bahkan Presiden berharap agar pelaku UMKM menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi bangsa. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56.534.592 unit. Oleh karena perlu sinergisitas untuk mengembangkan dan mempertahankan UMKM perlu diutamakan melalui penguatan UMKM. UMKM juga telah terbukti mampu bertahan terhadap krisis. Ketika krisis ekonomi terjadi tahun 1997-1998, UMKM mampu membuktikan tetap berdiri kokoh. Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan pasca krisis ekonomi 1997-1998 itu, jumlah UMKM justru meningkat bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Ditinjau dari pertumbuhannya, tahun 2016 pertumbuhan UMKM meningkat 4,17% dari 34,64% menjadi 38,81% sementara usaha besar justru mengalami penurunan 0,26% dari 9,94% menjadi 9,68%. Ini menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan pasca krisis 1998.

Penutup

Krisis ekonomi tahun 1997- 1998 yang melanda Indonesia telah membuat perekonomian bangsa seakan terpuruk. UMKM ditengarai sebagai pahlawan ekonomi yang menyelamatkan ekonomi bangsa dari keterpurukan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah pelaku UMKM pasca krisis ekonomi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah badai krisis ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja lebih besar dalam kancah perekonomian bangsa, yang meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode sama (tahun 2012 – 2017). Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, sector UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Atas kontribusi dan peran UMKM tersebut penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan agar perannya sebagai pilar membangun ekonomi bangsa dapat berjalan secara optimal.

Referensi

- Aisbit, John. 1994. "Global Paradox" The Bigger the World Economy, The More powerful it's Smallest Players. "New York: William Morrow and Company
- Effendi Ishak. 2005. Artikel : Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta
- Idris yanto, 2009. Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS NOMOS. Volume 2, Nomor 1/Januari 2009. ISSN 1979-1607. LPPEB FIS – UNG Inc.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Peran Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional; Sasaran Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005).
- Pujiono, 2012 Akselerasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM

- Singgih Moh. Nur. Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi Modernisasi Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang.
- Sukirno, S. 2004. Makroekonomi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta. Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM.
- Wahyudin, Dian. 2013. Peluang atau Tantangan Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015. Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.